



# BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 895/III/II/2016

## ASIAN GAMES XVIII 2018 HARUS RAIH EMPAT SUKSES



REVISI UU KPK AKAN DIBAWA KE  
**RAPAT PARIPURNA  
DPR RI**



**DESY RATNASARI :**  
INGINKAN  
PROGRAM KEMENSOS SENTUH  
ANAK JALANAN



**NASIR JAMIL :**  
USULKAN PEMBLOKIRAN  
SITUS LGBT



Jangan Lewatkan info DPR terkini  
dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# ASIAN GAMES XVIII 2018 HARUS RAIH EMPAT SUKSES



**T**im Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games ke XVIII Tahun 2018 DPR-RI menekankan, pesta olah raga empat tahunan bangsa-bangsa di kawasan Asia yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, harus bisa meraih empat sukses. Keempat sukses tersebut adalah sukses selaku tuan rumah, sukses prestasi, sukses administrasi pembiayaan dan sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Panja Ferdiansyah Jumat (12/2) lalu di Palembang, usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan jajaran serta meninjau Komplek Stadion Jakabaring dan wisma atlet serta sarana prasarana olah raga di kawasan tersebut.

Menurut Ferdi-panggilan akrab Ketua Tim Panja Komisi X ini, sukses selaku tuan rumah bisa ditunjukkan dengan dua kota penyelenggara yaitu Jakarta dan Palembang siap semua fasilitas antara lain dari venue, penginapan atlet dan transportasi. Sebagai tuan rumah yang baik maka soal kebersihan, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas harus ditata sebaik mungkin. Soal prestasi, atlet-atlet

harus disiapkan dengan baik termasuk pembagian cabang olah raga mana saja yang akan dipertandingkan.

Khusus cabang olah raga (cabor) pada bulan Maret harus sudah diputuskan berapa cabor di Jakarta dan berapa di Palembang, sehingga dalam waktu dekat Panja akan menggelar rapat mengundang Gubernur DKI, Gubernur Sumsel dan Menpora. Sedangkan sukses pembiayaan, DPR berharap tata kelola keuangan untuk Asian Games XVIII harus akuntabel jangan ada penyimpangan karena itu akan didampingi BPKP dan diperiksa BPK.

Dari sisi regulasi, politisi Partai Golkar ini berharap ada revisi Perpres tentang persiapan tuan rumah AG XVIII dan revisi Inpres barang dan jasa. Sebab ini adalah *crash* program sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Sumsel bisa memperoleh manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, misalnya karena even olah raga dihadiri masyarakat dari Kawasan Asia dan internasional, maka ada dampak peningkatan kunjungan wisata.

Secara umum, lanjut Ferdi, setelah

mendengar paparan Gubernur Sumsel dan mengunjungi stadion kompleks stadion Jakabaring, maka menambah keyakinan yang besar bahwa Palembang telah siap menjadi tuan rumah AG XVIII.

Menanggapi harapan Gubernur Alex Noerdin agar ada keadilan dalam penyelenggaraan AG XVIII ini, Ferdiansyah menyatakan akan bertindak seobyektif mungkin untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Kedua kota tuan rumah ini diharapkan mendapat perlakuan yang sama seperti anggaran, cabor yang jumlahnya 38, maka Jakarta 20 cabor dan Palembang 18.

Begitu pula harapan Gubernur Alex agar dapat menjadi tempat pada upacara penutupan, Komisi X akan membicarakan dengan pihak terkait. "Saya akan perjuangkan agar ada perlakuan yang sama, Jakarta tempat upacara pembukaan, maka Palembang bisa menjadi tempat untuk upacara penutupan. Saya berharap ada konsep yang jelas termasuk mempersiapkan berbagai atraksi yang menarik untuk bisa ditampilkan," kata Ferdiansyah menambahkan. (mp)/foto:mastur/parle/iw.

Tim Panja Persiapan Asian Games Ke XVIII saat meninjau Stadion Jakabaring Palembang





*Ketua DPR Ade Komarudin saat menerima Dubes Malaysia*

# KETUA DPR TERIMA DUBES MALAYSIA

**K**etua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2).

"Kedatangan Dubes Malaysia ke DPR yang pertama untuk mengucapkan selamat kepada saya, selaku Ketua DPR RI baru, yang kedua, kedatangan beliau berkaitan dengan rencana kunjungan Ketua Parlemen Malaysia pada 1 Maret yang akan datang," kata Ade dihadapan wartawan.

Kedatangan Ketua Parlemen Malaysia, ujar Ade, salah satunya akan berkunjung ke DPR, guna membicarakan agenda hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, "Seperti yang telah saya sampaikan kepada Pak Dubes, kami menyambut baik dan senang hati menerima kedatangan Ketua Parlemen Malaysia, karena ini dalam rangka menjalin hubungan yang baik antar kedua negara," tegasnya.

Rencananya, tambah Ade yang juga politisi dari Partai Golkar ini, akan dilangsungkan pembicaraan

dalam rangka peningkatan kerjasama antar kedua negara.

"Telah kami sampaikan juga, dalam pertemuan dengan Pak Dubes sebelumnya, bahwa kita sebagai satu serumpun tentu banyak hal yang akan disampaikan, satu kunci adalah terjalannya hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia, melalui komunikasi yang intensif antara pemimpinnya, antara kelompok swastanya dan kesemuanya itu bisa diselesaikan dengan baik," tegas Ade.

Sementara itu, ditempat yang sama Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim menjelaskan bahwa yang terpenting adalah terus menjaga hubungan antar kedua negara secara baik.

"Kita ini serumpun tapi dalam keserumpunan ini kita tidak boleh lari, ada yang pahit, ada yang manis, kadang-kadang mungkin ada masalah, tapi yang terpenting adalah kita harus selalu berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, Insya Allah dengan Nawaitu (niat-red) yang baik dapat diselesaikan" terang Datuk Seri Zahrain. *(nt//foto: iwan armanias, arief/parle/iw.*

#### **PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

#### **WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si,  
(DEPUTI PERSIDANGAN)

#### **PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

#### **WK. PIMPINAN REDAKSI**

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)

#### **REDAKTUR**

Mastur Prantono

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Suciati, S.Sos

#### **ANGGOTA REDAKSI**

Nita Juwita, S.Sos, Agung Sulistiono, SH,  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Hendra Sunandar, Surahmad Eko,  
Ria Nur Mega

#### **REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra, Iwan Armanias

#### **FOTOGRAFER**

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M.Ihham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Devi Iriandi, Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

#### **ADMINISTRASI FOTO**

Hasri Mentari

#### **SIRKULASI**

Bagus Mudjiharjanto

#### **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

**Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: [dpr.pemberitaan@gmail.com](mailto:dpr.pemberitaan@gmail.com)

[www.dpr.go.id/berita](http://www.dpr.go.id/berita)

#### **PENERBITAN & DISTRIBUSI**

##### **PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

##### **WK. PIMPINAN PENERBITAN**

Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

##### **Email**

[penerbitandpr@gmail.com](mailto:penerbitandpr@gmail.com)

*(isi berita dan materi foto  
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)*

## Pemanfaatan **ENERGI PANAS BUMI**

### Perlu Ditingkatkan

**WAKIL** Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto didampingi tenaga ahli dan staf Sekeretaryat Wakil Ketua DPR, disambut Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Direksi PT. Pertamina Geothermal Energy dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara saat berkunjung ke Bumi Nyiur Melambai sebutan Sulawesi Utara, Senin (15/02).



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berdiskusi dengan Jajaran PT Pertamina dan PT PLN di Sulut

Lawatan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulut yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto ini dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Energy Baru dan Terbarukan, Direksi PT. Pertamina Geothermal Energy dan Direksi PT. PLN ke Provinsi Sulut, khususnya PLTPB area Lahendong ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi penambangan panas bumi tersebut.

Terutama kebijakan energi nasional dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2015. "Indonesia memiliki potensi energy panas bumi sebesar 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia dan salah satunya ada di Sulut ini," tegasnya.

Untuk itu, ungkap Pimpinan DPR dari Fraksi PD ini, u p a y a - u p a y a optimalisasi sumber panas bumi harus terus dilakukan untuk

mengejar target pengembangan PLTPB sebesar 3.583 MW sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, target total 35.000 MW akan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dan kapasitas PLTPB ditingkatkan.

Lebih lanjut Pimpinan DPR yang mengkoordinir Komisi V, VI dan VII ini, berdasarkan laporan Komisi VII DPR RI bahwa PLTPB area Lahendong masih memiliki beberapa kendala-kendala diantaranya kendala sosial kemasyarakatan. Berkaca dari PLTPB Kamojang yang telah sukses dalam pengelolaan lingkungan hidup, Agus Hermanto berharap Lahendong dapat juga mengembangkan berbagai inovasi baik dari segi pengembangan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

Disamping itu, Agus menekankan, pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam pengembangan energi terbarukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. "Kedepan DPR RI khususnya Komisi-komisi terkait akan mengakomodir dan memberikan dukungan lebih tajam lagi dalam pengelolaan PLTPB Lahendong guna mencapai target kemandirian Energi Baru dan terbarukan serta dapat memberi manfaat bagi sektot-sektor padat karya UMKM sekitar", imbuhnya. (HR), foto : eka hindra/parle/hr.

## Pembangunan **Kepulauan Seribu** Salah Konsep

**W**akil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pembangunan di Kepulauan Seribu salah konsep, semuanya diimport dari konsep darat, padahal ini adalah kepulauan maritim. "Konsep ini adalah koreksi terhadap dasar berpikir daratan yang diseret ke laut, Presiden Jokowi khususnya, ketika dia bilang poros maritim dunia dan konsep negara maritim, harus mengerti betul bahwa konsep kelautan berbeda dengan apa yang sekarang dia lakukan" kata Fahri saat wawancara setelah melepas tukik di penangkaran penyu, Kepulauan Seribu, baru-baru ini.

Masyarakat di pulau seribu ini, kata Fahri, hanya menjadi objek bagi pembangunan orang Jakarta, bahkan *lifestyle* dan metode pembangunan ciri-ciri di pulau ini akhirnya menjiplak Jakarta.

"Disini membangun rumah menggunakan batu, beton, dan baja. Terlebih lagi, sudah pulau kecil, tapi menggunakan

pagar, secara fisik sudah salah konsep, persis bangunan mangkrak dengan biaya seadanya" tegasnya. Pimpinan DPR juga meninjau bangunan SMK 61 terlihat besinya sudah banyak yang berkarat.

la mencontohkan, bangunan SMK Maritim mestinya dibangun diatas laut, kalau perlu bikin terapung. Supaya anak-



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melepas tukik di Kepulauan Seribu



anak mengerti tentang konsep kelautan, ke depan bisa menjadi peneliti kelautan, "Saya sedih mendengar kebanyakan alumni SMK di Kepulauan Seribu banyak yang tidak bekerja di sektor kelautan, kalau begitu untuk apa dibangun SMK disini" tekannya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena *mindset* anak-anak sudah dirusak menjadi orang laut, padahal seharusnya dari awal diajarkan bagaimana mencintai laut, hidup dengan dinamika kelautan, dengan begitu akan muncul *mindset* kelautan dan bisa melihat masa depan di laut.

Ditambahkannya, ia juga menyalahkan pembangunan yang tidak ramah lingkungan terhadap ekosistem laut.

"Di sekeliling pulau ini dibeton dengan alasan untuk menangkal abrasi, Namun, menurut peneliti disini abrasi bisa diatasi dengan menanam mangrove, karena lebih ramah terhadap ikan, biota laut, termasuk kepada penyu yang kesulitan berkembang biak karena beton itu"

Sementara itu, Kepala Satuan Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu Wilayah III, Untung Suripto mengatakan, ancaman bagi penyu sisik dan hijau adalah banyaknya bangunan beton yang mulai dibangun di sepanjang pantai.

"Ancaman penyu adalah pembangunan beton sehingga penyu-penyu yang mau ke darat dan untuk bertelur tidak bisa," kata Untung. *(jk,mp)/foto:jaka/parle/iw.*

## Dewan akan Evaluasi Wacana PASTOR DIPLOMATIK



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

**W**akil Ketua DPR RI Fadli Zon menginformasikan bahwa Ketua DPR berencana akan mengevaluasi wacana paspor diplomatik (paspor hitam) untuk anggota DPR RI.

"Itu kesepakatan bersama di dalam paripurna. Kalau itu memungkinkan, tidak masalah diteruskan. Kalau itu kendala, tidak masalah distop. Wacana ini memang pertama kali diungkapkan oleh Setya Novanto saat masih menjabat sebagai ketua DPR, ketika melihat parlemen negara lain memakai paspor diplomatik," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dijelaskan Fadli bahwa di negara lain anggota parlemen itu menggunakan paspor diplomatik, bukan paspor biru. Menurut politikus dari Gerindra ini, paspor biru untuk PNS. "Selama saya sebagai pimpinan DPR menggunakan

paspor diplomatik ketika menghadiri konferensi-konferensi parlemen internasional. Tetapi, paspor itu tidak pernah dipegang sendiri," ujarnya.

Paspor hitam, jelas Fadli, bisa mempermudah. Artinya perlakuan diplomatik di bandara, di tempat sidang-sidang parlemen dunia dan sebagainya.

Sebelumnya, wacana paspor hitam ini sempat diungkit lagi di Komisi I DPR. Setelah ada sejumlah kontroversi dan penolakan, Menanggapi hal ini, Ketua DPR Ade Komarudin berjanji akan mengevaluasinya. "Itu kan langkah yang lama, saya akan bicara lagi dengan pimpinan fraksi seluruhnya. Nanti akan kita bicarakan lagi. Bisa dikaji, bisa dievaluasi," kata Ade. *(sc)/foto:iwan armanias/parle/iw.*



## Revisi UU KPK Akan Dibawa Ke RAPAT PARIPURNA DPR RI

**PLENO** Badan Legislasi Rabu lalu (10/02/2016) telah menetapkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk dibahas pada tingkat selanjutnya yaitu dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis ini (18/02/2016).

Namun sebagaimana diketahui, Fraksi Gerindra, Demokrat dan PKS menolak revisi RUU KPK ini, karena pemerintah dan KPK tidak satu kata, maka hal ini menguntungkan pemerintah.

Sebaliknya merugikan DPR RI yang dicitrakan masyarakat untuk melemahkan KPK.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan meminta Presiden Jokowi untuk tidak ambil untung dalam persoalan revisi ini. "Jokowi harus menjelaskan posisi revisi kepada masyarakat luas, yang saya minta adalah janganlah kita terus kucing-kucingan. Terutama saya berharap pada presiden untuk tidak mengambil untung dari isu



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

UU KPK ini," tegas politisi PKS itu pada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/0/2016).

Menurut Fahri, ia akan meminta agar Jokowi menjelaskan apa saja permasalahan dalam revisi UU KPK tersebut. "Jelaskan saja apa sih

masalahnya. Kan yang ditugaskan oleh rakyat untuk memberantas korupsi presiden, karena dia lah yang disumpah di depan MPR untuk menjalankan konsitusi dan menjalankan negara ini untuk kebaikan rakyat termasuk di dalamnya pemberantas korupsi," ujarnya.

Presiden RI, lanjut Fahri, yang mempunyai proposal untuk menjalankan revisi UU KPK ini. "Presiden RI yang mempunyai proposal untuk revisi UU KPK itu sendiri," pungkasnya. (sc)/foto: iwan armanias/parle/iw.

## Banggar DPR Dorong Pemerintah SEGERA BAHAS APBN-P 2016

**W**akil Ketua Badan Anggaran DPR-RI, MH. Said Abdullah mendesak pemerintah agar segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Dia berharap pemerintah sudah menyelesaikan tugas yang dimaksud itu pada bulan Juli.

"Raker ini bagian dari *warning* bagi pemerintah. Karena itu, saya berharap, saat mengajukan usulan revisi di bulan Juli nanti, pemerintah harus benar-benar siap," tandas Said, Rabu (17/2).

Said memberi alasan salah satu faktor yang menyebabkan perlunya perubahan asumsi APBN adalah anjloknya harga minyak mentah. Dia menjelaskan, hal ini merupakan fakta penyebab perkembangan kondisi perekonomian saat ini, berbeda dari asumsi APBN 2016.

Di sisi lain Ketua Banggar Kahar Muzakir mengungkapkan, berdasarkan

Undang-undang, lembaga legislatif tidak bisa mengambil inisiatif untuk melakukan pembahasan APBNP 2016 mendahului eksekutif. Dia menganjurkan revisi APBN merupakan inisiatif pemerintah yang proses penyusunan Undang-Undang-nya juga harus dilakukan oleh pemerintah.

"Jadi silahkan pemerintah kalau merasa APBNP itu penting bisa segera dibahas," ujar Kahar politisi FPG dari Dapil Sumatera Selatan I.

Dalam rapat ini dibahas, bahwa harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saat ini harga minyak dunia berada di level 30 dolar AS per barel. Angka ini menjadi angka terendah dalam 10 tahun terakhir.

Ketika Banggar bertanya apa yang menjadi alasan pemerintah menunda pembahasan APBNP 2016, pemerintah beralasan menunggu dilegalkannya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Karena itu Banggar berharap agar pembahasan RUU Tax Amnesty ini cepat rampung di DPR.

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menyakini, UU Tax Amnesty ini bisa menjadi motor penggerak tambahan bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2016 ini. "Kalau RUU ini sudah kelar, saya yakin, ekonomi kita akan melaju kencang," ujarnya.

Namun alasan Menkeu ini ditampik oleh Anggota Banggar dari F-PKS Abdul Fikri, menurutnya Tax Amnesty sama sekali tidak menguntungkan perekonomian nasional di kemudian hari. Bahkan dia menilai hal ini bisa membuka peluang kejahatan lama.

"Tax Amnesty hanya akan memberikan peluang pada kejahatan-kejahatan lama. Saya kira perlu penjelasan yang komprehensif," sangkal anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah IX. (eko,mp)/foto: andri/parle/iw.



Ketua Banggar Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Banggar MH. Said Abdullah



## PEMERINTAH HARUS TINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

**B**adan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rabu (17/2). Raker ini membahas tentang perkembangan ekonomi nasional tahun 2016.

Anggota Banggar DPR-RI Johnny G. Plate memperkirakan penerimaan negara pada tahun ini menurun. Menurut ini menjadi permasalahan ekonomi yang patut dikhawatirkan, pasalnya pendapatan negara tentu berhubungan dengan perkembangan ekonomi nasional.

"Hampir semua penerimaan negara kita diperkirakan turun pada tahun ini. Penerimaan pajak bumi dan bangunan serta bea cukai cenderung turun dan besarnya pun di atas 100 trilyun dari penerimaan negara kita" ungkap Johnny.

Anggota Dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur I ini menekankan kepada pemangku kepentingan, Menteri

Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dan beberapa lembaga di bawah naungan Menkeu agar memberikan perhatian secara serius soal penerimaan negara.

"Kami ingin menggaris bawahi agar ini menjadi catatan, sehingga rencana pertumbuhan kita dapat dipertahankan dengan stimulus belanja negara," jelas politisi dari Farksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Dalam raker yang dipimpin Ketuaanya Kahar Muzakir, Banggar menilai sejumlah asumsi yang tertuang dalam APBN 2016 sudah tidak lagi sesuai dengan realita yang ada saat ini. Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi juga masih menjadi sorotan para anggota dewan terhadap penerimaan negara tahun ini.

Johnny juga mengharapkan agar pemerintah mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi, menurutnya maka kinerja

pemerintah layak dikoreksi. "Kami khawatir apabila memang belanja kita pada tahun 2016 ini masih sama dengan tahun 2015, kita harus mengoreksi pertumbuhan kita lagi," pungkasnya.

(eko,mp), foto :  
a n d r i /  
parle/hr.



Anggota Banggar Johnny G Plate

## Desy Ratnasari Ingin PROGRAM KEMENSOS SENTUH ANAK JALANAN

**ANGGOTA** Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menginginkan Program-Program yang dikeluarkan Kementerian Sosial dapat menyentuh anak-anak jalanan, mereka juga berhak mengakses program-program pemerintah.

"Terkait anak jalanan, sejauh mana Kementerian Sosial telah

mempersiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sebuah program yang bisa menyentuh anak jalanan di seluruh Indonesia," katanya, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dengan agenda evaluasi kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015, Selasa (16/2/2016), di Gedung DPR, Jakarta.

Desy Ratnasari mengatakan, mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Dan mengacu pula pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, disitu ada rehabsos anak, tapi tidak melihat indikasi yang

spesifik terkait dengan anak jalanan.

"Jika mengacu kepada komponen peserta PKH disini hanya diungkapkan tentang anak yang terangkum, mencakup atau mengikuti sekolah secara formal, tapi anak jalanan tidak ikut sekolah formal," ungkapnya.

Ia menyebut contoh di dapil Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi), anak jalanan sudah dibantu untuk masuk ke dalam pelatihan dari Dinas Sosial di bawah Dirjen Pemberdayaan Sosial dan sudah diberikan pelatihan-pelatihan. Namun aplikasinya dan aksesnya seperti apa, belum jelas.

Desy berharap, Kementerian Sosial memiliki rencana program keluarga harapan yang bisa melindungi anak-anak jalanan. Mereka juga berhak untuk bisa mengakses program-program pemerintah dan berhak untuk bisa menjadi manusia yang mandiri sehingga tidak tidak menciptakan kemiskinan di kemudian hari.

(as)/foto:kresno/parle/iw.



Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari

# KOMISI IX DPR DESAK BKKBN

## Selesaikan Pendataan Keluarga



Suasana RDP Komisi IX dengan BKKBN

**K**omisi IX DPR mendesak Kepala BKKBN RI untuk menyelesaikan program pendataan keluarga, serta melakukan koordinasi data dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan pembangunan lainnya.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat RDP dengan Kepala BKKBN RI Surya Chandra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BKKBN RI untuk segera menyusun perencanaan perekrutan tenaga PKB/PLKB dengan memperhatikan pemerataan tenaga berdasarkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah.

Komisi IX DPR RI juga meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat inovasi program kependudukan dan keluarga berencana termasuk penggunaan alat kontrasepsi dalam mengatasi ledakan penduduk.

"Lalu, Komisi IX DPR meminta Kepala BKKBN RI untuk memanfaatkan jendela

peluang (window of opportunity) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain," kata Ermalena.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat program dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dan, Komisi IX DPR RI menyayangkan rendahnya serapan anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2015. Untuk itu Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran APBN Tahun Anggaran 2016.

Serta meminta Kepala BKKBN RI untuk memberikan rincian realisasi jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2015 per unit kerja, rincian jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2016 per unit kerja, dan jawaban secara tertulis atas pertanyaan anggota pada RDP hari ini, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016.

(ria)/foto:jayadi/parle/iw.

# UU ANTI TERORISME Belum Perlu Direvisi

UU Anti Terorisme dipandang belum perlu direvisi, karena masih cukup memadai. Apalagi, sejak 2013 aksi terorisme di Tanah Air sebetulnya cenderung menurun. Yang perlu dibenahi adalah manajemen BIN dan pengawasan terhadap Densus 88.

Demikian mengemuka dalam dialog bertajuk revisi UU Terorisme di DPR, Selasa (16/2). Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, dan pengamat dari Police Watch Neta S Pane. Pandangan ini sebenarnya ingin mengimbangi wacana revisi UU Anti-Terrorisme yang sedang bergulir di DPR.

Menurut Pane, tidak tepat bila karena peristiwa Thamrin kemarin, lalu muncul wacana untuk segera merevisi UU Terorisme. UU ini, katanya, baru berusia 13 tahun. Masih terlalu muda untuk direvisi. Tidak tepat pula bila kemudian BIN minta kewenangan untuk menangkap dalam revisi tersebut. Kewenangan penangkapan tetap ada pada Densus 88.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam masalah terorisme, lanjut Pane, adalah kembalinya para narapidana



Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid



terorisme menjadi pelaku teror pascapembebasannya. Ada pembinaan yang tak berhasil selama para pelaku teror menjalani hukuman. Dan untuk menumpas aksi teror tidak perlu dipertontonkan secara terbuka ke publik.

Sementara Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid setuju revisi tersebut sepanjang kewenangan Polri diperluas agar negara tidak kalah dengan teroris. Politisi PKB ini mengapresiasi kerja Polri dalam menangani kasus-kasus terorisme.

Saat yang sama Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan, revisi atas suatu UU harus berdasarkan kebutuhan. Selama ini, lanjutnya, belum ada kebutuhan mendesak untuk merevisi UU Anti-Terrorisme. Kalau pun harus direvisi harus memperhatikan kecermatan dan sangat teliti. Dan DPD tidak terlibat dalam revisi UU ini.

(mh)/foto:arief/parle/iw.



Suasana Diskusi Forum Legislasi

## Arif Wibowo dan Dossy Iskandar Prasetyo DILANTIK JADI WAKIL KETUA BALEG



Pelantikan Pimpinan Baleg oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon

**W**akil Ketua DPR Fadli Zon melantik dua pimpinan baru Badan Legislasi (baleg) DPR, yaitu Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Hanura. Keduanya dipercaya menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Berdasarkan pasal 64 ayat 2 peraturan DPR RI No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang tata tertib, Pimpinan Baleg terdiri atas 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan legislasi, dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah," jelas Fadli Zon saat

memimpin rapat pemilihan Pimpinan Baleg DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (16/02) siang.

Dengan demikian, formasi Pimpinan Baleg saat ini adalah Ketua Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) didampingi empat orang Wakil Ketua Firman Soebagyo (F-Golkar), Totok Daryanto (F-PAN), Arif Wibowo (F-PDIP) dan Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas berharap dengan bertambahnya Pimpinan Baleg mampu meningkatkan kinerja Baleg dalam menjalankan amanat konstitusi, terutama mempercepat proses harmonisasi pembentukan undang-undang di Badan Legislasi.

Sejauh ini, DPR telah melahirkan sebanyak 1.644 Undang-Undang sejak Indonesia merdeka. Namun, banyak pula Undang-Undang yang relevan dengan perkembangan dan situasi saat ini tetapi belum dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah. Seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(ann,mp)/foto:jayadi/parle/iw.

## Jordania Amankan Akses WNI Kunjungi

# SITUS BERSEJARAH PALESTINA



Wakil Ketua BKSAP Rofi Munawar saat menerima Anggota Parlemen Jordania

**W**akil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Muslim Center Party (Hizb Al-Wasat Al-Islamiy) Madallah Al-Tarawneh dan mengapresiasi ajakan Kerajaan Yordania untuk mengunjungi Yordania dan Al-Quds, Palestina melalui Yordania.

Rofi memastikan warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan perlindungan selama mengunjungi Al-Quds atau Jerusalem yang dikunjungi umat Islam dan Kristen dari Indonesia. "Walaupun Jordania kini dikelilingi oleh negara berkonflik, seperti Irak, Palestina, dan Suriah, Jordania menikmati keamanan politik dalam negeri. Keamanan ini disebabkan oleh kesadaran rakyat dan

pemimpinnya, dimana setelah Arab Spring, pemerintah dan parlemen di Jordania segera mereformasi dan mengamandemen undang-undang untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan keamanan," ungkap Madallah saat diterima Fraksi PKS DPR RI pada Selasa (16/2) di Kompleks Parlemen.

Jordania yang memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina dan Israel memastikan keamanan perbatasan Jordania - Israel bagi wisatawan Indonesia dalam rangka dukungan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

"Masyarakat Jordan dan Palestina sangat mendukung dan bersahabat, seperti paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kami juga memiliki satu juta pengungsi Suriah dan kami meminta dukungan dari Fraksi PKS dan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di Palestina dan Jordania. Kunjungan ke Palestina bisa jadi urusan sepele, tapi kunjungan tersebut dapat meningkatkan perekonomian rakyat Palestina. Kerajinan tangan dan wisata kuliner bisa menghidupkan mereka," ungkap Madallah.

Fraksi PKS menerima kunjungan dari partai politik terbesar di Parlemen Jordania (Majlis al-Umma). Selain Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, juga hadir Abdul Kharis Almasry dari Komisi X (bidang pariwisata) dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar.

"Kami mengapresiasi kedatangan Anggota Parlemen Jordania ke Fraksi PKS DPR RI hari ini. Kita menyambut kunjungan ini sebagai bukti Pemerintah Jordania memperhitungkan potensi ekonomi dan wisatawan Indonesia. Selain itu, Anggota Parlemen Jordania memandang penting membangun hubungan dengan PKS sebagai salah satu partai Islam berpengaruh di Indonesia," ungkap Rofi. (bksap,mp) foto: dok.bksap/parle/od

## KEPALA DAERAH BARU HARUS OPTIMALKAN DANA DAERAH

**P**residen telah melantik tujuh Gubernur di Istana Negara Jumat pekan lalu (12/2). Selanjutnya pada 17 Februari akan dilaksanakan pelantikan sebanyak 202 Bupati dan Walikota hasil Pemilu Kepada Daerah serentak Desember lalu. Terkait hal tersebut, Anggota Badan Anggaran DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan kepada Kepala Daerah yang baru dilantik untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah.

"Di APBN 2016 ini ada transfer dana ke daerah dan dana desa yang cukup besar yakni Rp. 770 triliun. Kepala Daerah yang baru dan akan dilantik harus mampu optimalkan dana tersebut. Ini untuk membangun kesejahteraan di daerah" ungkapnya dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (15/2), petang.

Selain itu menurutnya untuk mengoptimalkan penggunaan dan memanfaatkan dana daerah juga dapat melalui partisipasi aktif dari masyarakat. "Masyarakat

juga harus berpartisipasi untuk kawal dana daerah dan desa," imbuh politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hetifah yang juga Anggota Komisi II DPR menyarankan agar Kepala Daerah baru yang terpilih untuk pandai memanfaatkan dana daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pendampingan. Diharapkan dengan adanya pendampingan penggunaan dana daerah dan dana desa, Kepala Daerah dapat terhindar dari tindakan korupsi.

"Mungkin ada kebijakan Gubernur, Bupati atau Walikota yang sebetulnya untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi, Kepala Daerah dianggap melakukan penyelewengan dan bahkan korupsi. Untuk itu perlu pendampingan (kepada Kepala Daerah)" sambungnya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa pemerintah menyarankan adanya pendamping asisten nasional untuk mendukung Kepala Daerah dalam mengelola dana daerah dan dana desa yang cukup besar. Beberapa pakar menilai bahwa keberadaan pandamping untuk dana daerah dan desa akan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya praktek korupsi.

(eko,mp)/foto:andri/parle/iw.



Anggota Banggar DPR Hetifah Sjaifudian

## Baleg Sepakat Lanjutkan PEMBAHASAN RUU KARANTINA

**SEBAGAI** bagian dari lintasan internasional, karantina nasional belum berfungsi maksimal. Padahal karantina berperan sangat krusial dalam sistem pertahanan negara dalam bentuk pencegahan masuk, keluar serta tersebarnya hama dan penyakit yang bisa mengakibatkan terdegradasinya sumber daya hayati lokal.

"Karantina seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi bangsa dan negara.

Namun, pelaksanaan dan penyelenggaraan karantina belum berjalan efektif dan efisien," ungkap Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dalam Rapat Baleg dengan Komisi IV di Gedung Nusantara 1, Senayan, Senin (15/02).

Lazimnya, perkarantina di negara - negara maju saling terintegrasi dengan keimigrasian dan beacukai. Misalnya,



Amerika Serikat yang membentuk lembaga Custom and Border Protection yang menjadi filter pertama terhadap segala sesuatu yang masuk ke dalam negeri.

Sementara di Indonesia, lembaga karantina tersebar dalam beberapa kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo

Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan serta Kementerian Kesehatan. Akibatnya, arus birokrasi dan kekuatan penyidikan menjadi lemah.

Khususnya menghadapi era globalisasi ekonomi, karantina menjadi salah satu yang sangat penting. Firman Soebagyo mengungkapkan globalisasi ekonomi memiliki dampak yang luar biasa salah satunya pada volume tingkat perdagangan dunia yang turut berpengaruh pada peningkatan peluang resiko penyakit dan keamanan pangan.

Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam juga menambahkan, kondisi lingkungan kita sudah terancam sangat masif karena masuknya barang yang tidak terseleksi oleh karantina termasuk hewan, hama dan tumbuhan tidak terproteksi dengan baik sehingga lingkungan kita sangat memprihatinkan. Salah satu

pengusung RUU Karantina ini menyatakan, yang paling urgent adalah plasma nutfah kita yang keluar dan juga invasi laut yang berpotensi merusak biota laut. Sebagaimana diketahui, salak pondoh salah satu jenis salak terenak di nusantara sudah mulai dibudidayakan di Thailand. Belum lagi jenis tembakau termahal di dunia, tembakau srinthil yang merupakan ciri khas Temanggung sudah dicuri dan dibudidayakan di China.

Untuk itu, diharapkan Pembentukan Badan Karantina Nasional (BKN) menjadi garda terdepan tidak hanya menyelamatkan semua jenis-jenis tumbuhan dan biota laut tetapi juga memastikan bahwa siapapun yang masuk ke Indonesia dalam posisi clean and clear.

Rapat Badan Legislasi DPR bersepakat untuk menindaklanjuti pembahasan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi hak inisiatif DPR melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). *(ann, mp)/foto:jayadi/parle/iw.*

## Komisi III Harapkan Ikahi Buat DIM Komprehensif RUU KUHP

**W**akil Ketua Komisi III DPR-RI, Benny K. Harman memimpin rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUHP dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dari IKAHI hadir pengurus terdiri Ketua Umum, I Gusti Agung Sumanatha dan didampingi Ketua Suhadi, dan Andi Samsan Nganro.

Benny sebagai pimpinan rapat meminta kepada IKAHI untuk menyiapkan pemikiran yang serius terkait dengan usulan revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia juga mengusulkan agar IKAHI membuat daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Karena itu saya usul IKAHI bikin lagi sebuah DIM yang komprehensif terhadap Rancangan Undang-Undang ini," ujar anggota Dewan dari Dapil Nusa Tenggara Timur I, Selasa (16/2)

Rapat yang diselenggarakan di ruang sidang Komisi III DPR, Gedung

Nusantara II ini, Benny menandakan bahwa IKAHI punya pengalaman-pengalaman dalam putusan dan yurisprudensi yang selama ini pernah terjadi. Oleh sebab itu IKAHI memiliki kompetensi dalam memberikan usulan RUU KUHP. "Apa yang Bapak-bapak kehendaki akan kami perjuangkan dalam revisi undang-undang ini," tandas Benny.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, keberadaan IKAHI penting sebagai elemen penegak keadilan dalam negara. Benny melanjutkan, IKAHI merupakan wadah untuk para hakim sebagai penyelenggara negara yang bertugas menggunakan hukum pidana dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengadili.

Pendiri Setara Institut For Democracy ini beranggapan, dalam KUHP terkandung nilai-nilai filosofis, yang menjabarkan tentang tindak pidana. "Jadi perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa

kita tetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Kemudian soal pertanggung jawabannya, dan hal-hal yang mengecualikannya, kami menganggap Ikahi yang tahu hal ini," papar Benny. *(eko,mp)/foto:andri/parle/iw.*



Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman

# NASIR DJAMIL

## Usulkan Pemblokiran Situs LGBT

**A**khir-akhir ini, pemberitaan mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mencuat di publik. Hal ini yang juga membuat Menkopolkam Luhut Panjaitan membuat statemen di media bahwa LGBT tetap harus dilindungi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan kesepahamannya namun tetap harus dilindungi dalam artian yang sebenarnya. "Karenanya saya teringat apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan agar mereka tidak menyebarkan paham mereka, keberadaan mereka tidak bisa dinafikan tapi jangan sampai mereka melakukan propaganda untuk menyebarkan paham mereka," ujarnya saat Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menkopolkam Luhut Panjaitan, Senin (15/01).

Politisi Fraksi PKS ini juga mengingatkan kepada pembantu presiden agar menjalankan instruksi Jusuf Kalla

tersebut." Dan saya pikir karena Wapres Jusuf Kalla sudah menyampaikan, maka sudah menjadi tugas bagi pembantu presiden untuk menindaklanjuti," paparnya.

Selain itu, Nasir Djamil juga mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan pemblokiran terhadap situs yang melakukan propaganda untuk menyebarkan paham LGBT tersebut. "Saya pikir tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs yang melakukan propaganda LGBT, sama halnya dengan pemerintah yang waktu dulu melakukan pemblokiran terhadap situs yang dinilai mengandung benih terorisme," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, isu tentang LGBT menjadi perbincangan publik setelah ada dugaan penggelontoran dana sebesar US\$ 8 juta atau sekitar Rp 108 miliar dari United Nations Development Programme (UNDP) untuk mendukung LGBT di Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. *(hs,mp)/foto:andri,runi/parle/iw.*



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

## Tentara Dimungkinkan Berantas Terorisme

*Komisi I dan Komisi III DPR-RI menggelar Rapat Gabungan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan beserta lembaga pemerintahan dibawah koordinasinya, antara lain Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kejagung M. Prasetyo.*





**DALAM** rapat gabungan kali ini, Senin (15/2) di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II membahas tentang tiga hal penting yakni pemberian amnesti, kebijakan bebas visa, dan penanggulangan terorisme.

Anggota Komisi I DPR Effendi M.S. Simbolon berpesan, dalam pemberantasan terorisme aparat keamanan negara baik Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diberikan kewenangan dalam penanggulangan teror.

"Saya hanya ingin berpesan bahwa selain kepolisian sesuai dengan Undang-Undang 34 tentang TNI juga diberi kewenangan itu. Jadi kalau bisa khusus mengenai anti teror ini dibentuk saja model KPK-nya," ujar Dewan dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Alumnus Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ini sepenuhnya mendukung kebijakan untuk memberikan pengutan regulasi yang akan memberikan pemantapan pada setiap pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan negara.

"Dalam hal ini ujung tombaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam bentuk apa, model apa monggo Pak," ungkap politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Effendi juga menegaskan bahwa, teroris tidak bisa dikelompokkan dalam kriminal umum, kriminal korupsi dan sebagainya. Oleh sebab itu dia menyarankan untuk penanganan terorisme bisa dibentuk polisi khusus dan TNI khusus.

"Karena kami melihat mubazir, TNI tidak pernah digunakan, saya khawatir nanti mereka frustrasi, malah justru nanti menjadi pelatih-pelatih seperti Santoso begitu," kata Effendi.

Sementara itu, di kesempatan selanjutnya, Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diberikan kewenangan menyadap layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jagan cuma KPK yang punya alat penyadapan yang canggih, BNPT juga harus punya," tandasnya. *(eko)/foto:andri, runi/parle/iw.*

## PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG Keberadaan Agen Berita Asing di Papua

**A**nggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberikan bebas visa bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia karena memungkinkan dampak buruk yang terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan agen berita asing di Papua yang dicurigai memiliki motif lain guna mendukung Papua merdeka.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I dan Komisi III dengan Menkopolkum beserta jajaran kementeriannya yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (15/02).

"Kami meminta pemerintah terkait pembebasan masuk bagi agen berita asing untuk ditinjau kembali. Apa betul mereka agen berita yang tidak membawa misi apa-apa. Bagaimana kita bisa tahu kalau sebetulnya mereka adalah agen agen yang menghendaki papua lepas?," ujarnya.

Menurutnya, Papua adalah masalah besar sehingga menjadi suatu kesalahan jika Pemerintah mengatakan bahwa papua bukan masalah besar. "Di setiap rapat separatis, kalimat pertama yang disebut adalah getting free from indonesia. Sehingga kami

menilai pemberian ijin bebas masuk kepada para wartawan asing tanpa melalui proses duduk bersama antara pemerintah dengan DPR adalah sesuatu yang patut disesalkan," papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

"Pasalnya, ini terkait keinginan Papua untuk merdeka karena sudah bertahun-tahun Papua menuntut merdeka tapi hasilnya nihil karena tak ada negara lain yang ingin membantu Papua. Tetapi saat ini, isu tersebut bergeser menjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua, dengan begitu banyak negara yang menjadi simpati terhadap Papua," ujar Tantowi dalam Rapat Gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadly Zon ini.

Meskipun begitu, bukan berarti Politisi Partai Golkar Dapil DKI Jakarta III anti terhadap keterbukaan, namun dirinya mengharapkan adanya duduk bersama dalam menyikapi keterbukaan ini agar tidak disalahgunakan. Sebagaimana diketahui, dalam paparan yang dijelaskan oleh Menkopolkum Luhut Panjaitan ada wartawan yang membuat film dokumenter tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Namun menurut Tantowi film dokumener itu sebagian besar adalah kebohongan. *(hs,mp)/foto:andri/runi/parle/iw.*



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya

## LEGISLATOR PERTANYAKAN Antisipasi Pemerintah dalam Proxy War



Rapat Gabungan Komisi I DPR dan Komisi III DPR dengan Pemerintah

**ANGGOTA** DPR Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi maraknya proxy war yang terjadi belakangan ini. Karena ini akan merugikan masyarakat meskipun tidak terjadi kekerasan secara fisik. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menkopolkum yang diikuti oleh jajaran Kementerian terkait pada Senin (15/02).

"Saat ini, perang fisik sudah tidak ada lagi tetapi yang terjadi adalah perang proxy atau yang disebut dengan perang asimetris. Tetapi kita tidak menyadari itu, anehnya justru banyak masyarakat yang menikmatinya," ujarnya.

Politisi Golkar yang menjabat Wakil Ketua BKSAP ini juga menyoroti maraknya terorisme di Indonesia sebagai bentuk proxy war. Hal itu disebabkan pengaruh dunia maya meskipun dalam dunia nyata tidak terjadi apa-apa. "Adanya orang

Indonesia yang dituduh sebagai agen pergerakan terorisme adalah hal yang belum tentu benar, itu bagian dari proxy war. Karena setelah memasuki era digital, dunia itu terbelah dua yakni dunia nyata dan dunia maya. Di dunia maya cukup ramai, namun di dalam konteks dunia nyata tidak terjadi apa-apa," ujar anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, Tantowi juga menyoroti dan mempertanyakan kepada pemerintah terkait masih adanya perang antara dua kubu yang terfragmentasi pasca Pemilihan Presiden 2014 yang dinilai sebagai bentuk proxy war. "Lihat dunia maya, masyarakat pasca Pilpres masih belum bersatu. Apakah pemerintah tidak curiga bahwa ada orang yang bermain untuk mengadu domba antara pendukung capres nomor satu dan dua yang sebetulnya sudah selesai pemilihannya. KMP dan KIH sudah tidak ada, tetapi perang di dunia maya masih marak," ujarnya.

"Terkait proxy war yang masih marak di dunia maya, saya belum melihat adanya langkah pemerintah untuk menertibkan hal itu," pungkasnya. *(hs,mp)/foto:andri,runi/parle/iw.*

pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

"Dalam Raker Komisi VIII ini ada 3 isu penting yang akan digali, pertama adalah bagaimana realisasi penyerapan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh unit satuan kerja, baik Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yang dalam hal ini telah dianggarkan sebesar Rp.22,4 Triliun," papar Saleh, dalam raker yang dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Selanjutnya, terkait tindak lanjut Hapsem I Tahun 2015 BPK RI, Komisi VIII juga meminta untuk mendapatkan gambaran tentang hasil pemantauan dan tindak lanjut serta rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti dan hal-hal yang menjadi kendala sehingga masih adanya temuan BPK tersebut.

Kemudian terkait isu aktual program pembangunan kesejahteraan sosial, Komisi VIII hendak mengetahui respon Kementerian Sosial terhadap dukungan anggaran tahun 2016, dikaitkan dengan program-program proiritas dan unggulan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat serta upaya pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun penanganan masalah masyarakat korban konflik sosial, korban bencana, serta penyaluran raskin.

## Komisi VIII Evaluasi Kinerja Kemensos

**K**omisi VIII melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Sosial RI, untuk mendapatkan penjelasan realisasi anggaran

2015. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan deskripsi tingkat capaian kinerja, baik manfaat langsung maupun tidak langsung, dalam rangka

### ISU AKTUAL

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, ada beberapa isu lain yang sekaligus tidak bisa dipisahkan dengan isu lainnya, pertama adalah soal pendataan kemiskinan, karena selama 1 tahun



Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemensos



terakhir telah menghabiskan energi dalam rapat Komisi VIII bersama dengan Kementerian Sosial, karena ada kesimpang-siuran atau ketidakfalian data-data tentang kemiskinan dan problemnya.

"Dalam Raker ini, Komisi VIII minta capaian yang sudah dilakukan Kementerian Sosial terkait dengan updating, validasi serta verifikasi data kemiskinan yang sudah dilakukan," kata Saleh.

Hal kedua terkait isu actual, adalah berkenaan dengan problematika konflik sosial yang makin menggejala, termasuk diantaranya adalah Kementerian Sosial dalam penanganan terkait pengungsi eks-gafatar, dan mengembalikannya ke daerah asal. Menurut Saleh, Komisi VIII juga memiliki rasa tanggung jawab yang sama dengan Kementerian Sosial dalam rangka stabilitas keamanan dan kesejahteraan sosial terkait dengan para pengungsi tersebut.

Hal ketiga, saat ini ada isu yang sangat menyita perhatian, dalam informasi yang diperolehnya, hampir semua menteri yang terkait dengan isu ini sudah berkomentar, yaitu terkait dengan lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) di Indonesia, karena ini adalah fenomena sosial.

Saleh mempertanyakan kepada Menteri Sosial bagaimana sikap pemerintah sesungguhnya terkait dengan LGBT, karena mulai dari Menkopolkumham, Mendikbud, Menristekdikti, Menteri Agama,

Menkominfo, sudah memberikan pernyataan, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut hanya sebatas pernyataan, bahwa LGBT ini dianggap tidak sesuai dengan norma dan budaya Indonesia. Tetapi langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah belum ada.

"Apa yang resmi sebetulnya tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah, karena bagaimanapun juga mereka yang masuk dalam komunitas LGBT ini adalah juga rakyat Indonesia. Secara hukum memiliki hak yang sama, perbedaannya adalah mereka memiliki mungkin perilaku yang dianggap oleh sebagian mayoritas rakyat Indonesia menyimpang dari yang sesungguhnya," tanya Saleh.

*(as/ag)/foto:kresno/parle/iw.*

## Kewenangan Koordinator **PENANGGULANGAN BENCANA** tetap BPBD

**K**omisi VIII DPR RI menemukan salah satu persoalan besar mengenai mekanisme koordinasi penanganan bencana di daerah. Ada hal yang perlu dikoordinasikan karena harus mengharmonisasikan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Problemnya adalah institusi di daerahnya, institusi penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tapi Undang-Undang No.23 Tahun 2014, dalam bentuk dinas.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Komisi VIII menginginkan pola hubungan Pusat dan Daerah dan tidak menyulitkan dan tidak menjadi hambatan untuk pencairan dana, terutama untuk bencana karena bencana tidak bisa diprediksi kapan adanya.

"Komisi VIII menginginkan institusi penanganan bencana di daerah tetap dalam bentuk BPBD, sesuai dalam bentuk Undang-Undang," kata Ledia Hanifa, usai Rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ketika instansi penanggulangan bencana di daerah menjadi dinas, maka mekanisme keuangannya menjadi beda. Mereka tidak bisa dengan serta-merta mengelola uang bantuan siap pakai dari Pusat, untuk kemudian langsung dikelola dalam penanggulangan bencana.

"Kalau Dinas harus masuk ke dalam dana mekanisme anggaran. Mekanisme bencana kan tidak mengikuti waktunya siklusnya." jelasnya.

Ledia Hanifa menyampaikan itu yang menyebabkan kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk didiskusikan lebih dalam dengan Kementerian Dalam Negeri, karena nanti akan menjadi masalah ketika ada Undang-Undang 23 Tahun 2014, mereka tidak bisa mencairkan dana siap pakai yang dimiliki karena mekanisme.

Selain itu, peta rawan bencana atau peta risiko bencana belum dijadikan dasar untuk penetapan rencana tata ruang wilayah misalnya RT/RW di daerah. Itu juga tidak diperhatikan untuk meminimalisir potensi bencana.

"Dalam hal ini kami (Komisi VIII dan BNPB) sudah menyepakati untuk membicarakannya dengan Komisi II dan Menteri Dalam N e g a r i , "

*tegasnya.  
(as/ag/ms)  
/ foto :  
kresno/  
parle/iw.*



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah

## LGBT SALAH SATU ISU

Yang Ditanyakan Komisi VIII



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaanan Daulay

**KOMISI VIII DPR RI** mempertanyakan sikap Pemerintah yang saat ini ada isu yang sangat menyita perhatian. Informasi yang diperoleh Ketua Komisi VIII Saleh Partaanan Daulay menyebutkan, hampir semua menteri yang terkait dengan isu ini sudah berkomentar, yaitu terkait dengan lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) di Indonesia, karena ini adalah fenomena sosial.

Menurutnya, mulai dari Menkopohukam, Mendikbud, Menristekdikti, Menteri Agama, Menkoinfo, sudah memberikan pernyataan, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut hanya sebatas pernyataan, bahwa LGBT ini dianggap tidak sesuai dengan norma dan budaya Indonesia, tetapi langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah belum ada.

"Apa yang resmi sebetulnya tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah, karena bagaimanapun juga mereka yang masuk dalam komunitas LGBT ini adalah juga rakyat Indonesia. Secara hukum memiliki hak yang sama, perbedaannya adalah mereka memiliki mungkin perilaku yang dianggap oleh sebagian mayoritas rakyat Indonesia menyimpang dari yang sesungguhnya," ungkapnya. (as)/foto:kresno/parle/iw.

## DPR SAYANGKAN

### Anggaran PBI 2015 Tidak Terserap

**K**omisi IX DPR menyayangkan tidak terserapnya tambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2015 sebesar Rp. 398 miliar, dan Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat Raker dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2).

Menurut Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, dirinya mempertanyakan alasan tidak terserapnya anggaran (PBI) dan bagaimana koordinasinya, "Saya ingin tahu bagaimana komunikasi antara Kemenkes dengan Kemensos terkait tidak efektif dan efisiennya kepesertaan PBI," tanya Irgan.

Senada dengan Irgan, menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menjelaskan, bahwa jumlah peserta PBI masih pro dan kontra serta dana 398 miliar yang

belum terserap dengan baik, "Masih banyak ditemui masyarakat yang membutuhkan justru belum terdaftar sebagai penerima bantuan," tegas politisi dari Fraksi PPP ini.

Sementara itu, dalam laporannya, Menkes Nila F Moeloek menjelaskan, untuk pembayaran PBI hanya terserap 97,75 persen dikarenakan mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P sebesar Rp.422 miliar.

"Akan tetapi belum semua terserap dikarenakan, Kemensos belum semua menetapkan tambahan peserta PBI dari penduduk miskin dan penetapannya baru bulan Desember 2015," jelas Nila. (ria)/foto:jayadi/parle/iw.



Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz

## RAKER KOMISI IX DENGAN MENKES Hasilkan Tujuh Kesimpulan

**RAPAT** Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Nila F Moeloek, di Jakarta, Senin (15/2), dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf, hasilkan tujuh butir kesimpulan, pertama Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian kesehatan RI untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dalam APBN tahun 2016 sehingga realisasi anggaran dapat lebih baik dibanding tahun 2015.

Kedua, Komisi IX DPR RI menyayangkan tidak terserapnya

tambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2015 sebesar Rp. 398 Miliar, untuk itu Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.

Ketiga, Untuk penanggulangan penyebaran virus zika dan KLB DBD, Komisi IX DPR RI meminta Kementrian Kesehatan RI untuk nmelakukan hal-hal sebagai berikut, mengintensifkan penelitian dan pengembangan vaksin dengue dengan melibatkan berbagai lembaga penelitian



dan perguruan tinggi, memperluas cakupan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait DBD dan Zika dengan melibatkan anggota Komisi IX DPR RI, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melayani pasien DBD dengan baik, dan lebih memberdayakan masyarakat, kader posyandu serta pemantau jentik (Jumantik).

Keempat, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan RPP tentang Transplantasi Organ, jaringan dan Sel sebagaimana diamatkan oleh UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Kelima, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian kesehatan RI untuk membuat roadmap kemandirian obat nasional dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat akan ketersediaan, keterjangkauan dan ketepatan obat.

Keenam, mengingatkan kembali

akan hasil kesimpulan Rapat kerja dengan Menteri kesehatan pada tanggal 2 Desember 2015 bahwa Komisi IX DPR RI meminta kementerian Kesehatan RI untuk mengawal proses pengangkatan tenaga kesehatan

PTT menjadi CPNS di tahun 2016, sehingga proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan ketujuh, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian kesehatan RI untuk memberikan, rincian realisasi jenis belanja kegiatan/program dalam APBN



Komisi IX DPR RI Raker Dengan Menkes

Tahun Anggaran 2015 per unit kerja, rincian anggaran terkait penempatan bidan PTT tahun 2016, dan jawaban secara tertulis atas pertanyaan anggota pada rapat kerja hari ini selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016. (ria)/foto:jayadi/parle/iw.

## DPR HARAPKAN DANA OTSUS Sentuh Rakyat Aceh

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berharap agar dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada Provinsi Aceh, dapat menyentuh kehidupan rakyat secara langsung, agar pelaksanaan otonomi khusus memiliki jejak dan bermanfaat bagi rakyat. Pasalnya, dana yang diberikan juga sudah sangat besar.

Hal itu ia katakan saat memimpin kunjungan kerja Tim Pemantau DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (17/02/2016). Kunjungan Tim ini guna melakukan pengawasan atas pelaksanaan otsus. Selain pengawasan, Tim juga dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi masyarakat atas pelaksanaan otsus.

"Sejak 2008 hingga 2015, Aceh telah menerima dana otsus senilai Rp 41,49 triliun, namun tingkat kemiskinan di Aceh pada 2015 tercatat masih merupakan yang tertinggi kedua di Sumatera, dan tingkat penganggurannya juga masih tergolong tertinggi di

Indonesia. Ini salah satu catatan Tim Pemantau," kata Fadli.

Apalagi, tambah Politisi F-Gerindra itu, sesuai dengan UU Otonomi Khusus, dana otsus dimaksudkan untuk melakukan percepatan peningkatan



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya otonomi khusus diikuti dengan pemberian dana yang juga sangat besar.

"Karena pemberian dana otsus bagi Aceh dibatasi hanya 20 tahun, yaitu hingga 2027, Tim Pemantau berharap

agar dana tersebut benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan," tambah politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota DPR Firmandez (F-PG), Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan), Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Fadhlullah (F-Gerindra), Muslim Ayub (F-PAN), Irmawan (F- PKS), Nasir Djamil (F- PKS), dan Bachtiar Aly (F-Nasdem).

Dalam kunjungan hari pertama, Tim mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur pimpinan Pemerintah Aceh, yang dihadiri oleh gubernur, bupati dan walikota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, serta sejumlah pimpinan lembaga daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

Pada hari kedua, Tim Pemantau melakukan pertemuan khusus dengan Pangdam dan Kapolda, untuk mengetahui isu-isu keamanan mutakhir di Aceh. (Tari Nugroho, sf, mp) Foto: Hamdis

## Komisi X Akan Kaji Usulan SEKOLAH PERFILMAN



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

**ANGGOTA** Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, pihaknya akan segera mengkaji mengenai usulan dibentuknya sekolah perfilman oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi). Sekolah perfilman yang diusulkan, baik di tingkat sekolah menengah maupun sekolah tinggi ini, diharapkan menjawab makin turunnya kualitas film Indonesia.

"Kita akan kaji soal keinginan yang diusulkan Aprofi ini untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan perfilman

atau sekolah tinggi perfilman. Sebagai sebuah gagasan, tentu ini harus kita respon dengan bijaksana dan arif, dan akan kita bicarakan lebih lanjut mengenai tingkat kepentingan sekolah perfilman ini," kata Dadang, disela-sela RDP dengan Aprofi, di

Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (15/02/2016).

Politisi F-Hanura itu menilai, walaupun ada harapan dengan adanya sekolah perfilman itu dapat meningkatkan kualitas perfilman Indonesia, namun juga perlu dilihat bahwa kualitas dunia perfilman juga berasal dari bakat. Ia menilai, sentuhan akademis tidak terlalu kuat mendukung kualitas film.

"Orang-orang yang terjun di dunia perfilman, mulai dari artis, produser, dan

tenaga lainnya, mereka memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Sentuhan akademis saya rasa kontribusinya tidak terlalu besar," kata Dadang.

Dadang menduga, soal kualitas film yang menurun dan lesunya film-film nasional, diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, bisa diakibatkan lemahnya daya film nasional dibanding film asing yang masuk ke Tanah Air. Lemahnya daya saing ini diakibatkan karena kompetensi para pelaku film Indonesia di bawah standar film internasional.

"Atau karena tingkat pendapatan yang masih rendah di masyarakat, sehingga hanya 30 persen penduduk Indonesia yang memanfaatkan jasa ekshibisi bioskop. Namun bisa saja ada hal apa yang kemudian mengakibatkan film-film nasional semakin lesu," imbuh Dadang.

Terlepas dari itu, Dadang menambahkan, apapun usulan yang dapat mengedepankan film Indonesia menjadi lokomotif kebudayaan, tentu pihaknya akan mendorong itu. Termasuk usulan dibukanya sekolah perfilman.

"Kepentingan kita untuk meningkatkan kompetensi perfilman, apalagi ini dikonstruksikan melalui dunia pendidikan, ini menjadi sesuatu yang positif dan perlu kita dorong," tutup politisi dari dapil Jawa Barat itu. *(sf)/foto:azka/parle/iw.*

## KOMISI X YAKIN PALEMBANG SIAP MENJADI TUAN RUMAH AG XVIII

**S**etelah mendengar dan menyaksikan video paparan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin serta peninjauan lokasi komplek olah raga Jakabaring mengenai persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII, Komisi X DPR merasa yakin dan optimis, kota empek-empek itu akan sukses sebagai salah satu tuan rumah.

"Saya tambah optimis dan mempunyai keyakinan besar bahwa Palembang siap menjadi tuan rumah yang baik," kata Ketua Tim Panja Persiapan AG XVIII 2018 Komisi X DPR Ferdiansyah di sela-sela kunjungan ke Jakabaring Sport Centre (JSC) Jumat (12/2) lalu.

Sejumlah venue yang ditinjau langsung Komisi X diantaranya Stadion Gelora Sriwijaya, venue Aquatic, stadion atletik, kolam renang dan tenis lapangan serta wisma atlet. Kondisinya sudah baik dan terawat dan memenuhi persyaratan internasional.

Pandangan yang sama disampaikan anggota anggota Komisi X SY Anas Tahir dari FPP, mengaku sangat terkesima dengan paparan Gubernur Sumsel. Dia menyatakan sangat optimis dan yakin pembangunan LRT dan fasilitas lainnya sebagai sarana transportasi terwujud, maka akan sukses sebagai tuan rumah AG XVIII 2018.

"Kalau semua persiapan telah terwujud maka Palembang layak sebagai Propinsi Olah Raga di Indonesia," kata Anas yang disambut tepuk tangan hadirin. Hal yang sama dikatakan anggota Panja Sri Mellyana bahwa Provinsi Sumsel dan Palembang telah mempersiapkan diri dengan maksimal. "Sukses sebagai tuan rumah ini telah diwacanakan dan mendapat dukungan seluruh masyarakat," ungkap politisi Gerindra dari Dapil Sumsel ini.

Anggota Panja lainnya Nurhasan dari FPKS mengatakan, di tengah keterpurukan olah raga, Gubernur Sumsel mempunyai ide kuat dan keyakinan. "



Semua terintegrasi. Intinya dukungan, kesiapan Sumsel memang luar biasa sehingga dalam raker dengan pemerintah akan dikomunikasikan secara obyektif dan pemerintah harus cepat ambil keputusan," tekan dia.

Sementara mantan ratu tenis nasional Yayuk Basuki mengaku takjub dengan persiapan yang dilakukan Pemprov Sumsel. "Terus terang sebagai

orang yang berlatar belakang olah ragawan, terkesima dengan paparan Gubernur," ujarnya.

Waktu undian tuan rumah AG XVIII di Makao, Indonesia kalah dengan Vietnam, karena yang ditawarkan menjadi tuan rumah Jawa Timur yang belum siap sama sekali dan venue belum ada. Politisi PAN ini menyatakan mengapresiasi Gubernur menjaga dan

merawat kompleks olah raga Jakabaring dengan baik,

la menambahkan bahwa venue-venue OR di Indonesia banyak yang tidak terawat. Seperti di Kaltim sayang sekali venuenya bagus tidak dirawat sehingga terkesan mubazir. Untuk itu dia berharap bisa kerja sama dengan panitia agar anak-anak (atlet) pindah latihan disini.

"Di JSC semuanya layak. Saya salah satu atlet yang menentang atlet tinggal di Century (Komplek Senayan) karena sangat tidak layak, sehingga atlet tidak focus, sementara di Palembang sudah siap," ungkap Yayuk Basuki.

Tim kunker Panja Persiapan AG XVIII terdiri Ferdiansyah (FPG) selaku Ketua Tim didampingi anggota Isma Yatun (F-PDIP), Bambang Sutrisno (FPG), Dwita Ria Gunadi dan Sri Mellyana (F-Gerindra), Yayuk Basuki (F-PAN), Lathifah Shohib (F-PKB), Nur Hasan Zaidi (F-PKS), SY Anas Thahir (FPP) dan Ferry Kase (F-Hanura).

(mp)/foto:mastur/parle/iw.



Tim Panja Persiapan ASIAN GAMES XVIII Komisi X DPR Pantau Komplek Olahraga Jakabaring Palembang

## PANJA PERFILMAN KOMISI X

### Gali Masukan ke ISI Yogya

**PANJA** Perfilman Komisi X DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta guna mendapatkan masukan mengenai Perubahan Undang-Undang No.33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X Abdul Kharis Almayahari mengemukakan hal itu di ruang rapat (ISI) Yogyakarta Jumat (12/2) sore.

Abdul Kharis mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang ini mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah produksi film nasional yang berkualitas, dan ekspansi film impor yang mulai menguasai pasar perfilman Indonesia.

Film sebagai karya seni budaya kata Kharis, memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. Oleh sebab itu negara bertanggungjawab untuk memajukan perfilman.

Masukan-masukan dari kampus ISI ini betul-betul dapat membantu dalam proses pembahasan di Panja Perfilman di Komisi X DPR. Proses panja film ini direncanakan memakan waktu dua kali masa sidang, sehingga diharapkan sudah dapat diselesaikan dengan rekomendasi revisi UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman tersebut nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna.

Dia berharap ada revisi yang maksimal sehingga betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku perfilman. UU yang diterbitkan pada tahun 2009 sudah ketinggalan jaman, sementara pergerakan perfilman bergerak sangat cepat, perkembangan teknologi juga sama cepatnya sehingga dituntut untuk dapat menyesuaikan.

Sementara Rektor ISI Agus Burhan mengatakan, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah yang membuka DNI sampai seratus persen, diakuinya nanti tenaga kerja Indonesia bukan lagi

menjadi tenaga kerja, akan tetapi hanya sebagai buruh saja yang betul-betul tidak ada harganya.

Dia juga mengkhawatirkan jika peran perguruan tinggi yang hanya akan menjadi pembantu saja. Karena itu harus memperkuat SDM dan penguatan skill, ditunjang dengan percepatan teknologi yang sama kuatnya serta ditopang oleh regulasi sehingga perfilman nasional makin maju(spy,mp).

Foto: Supriyanto/parle/od



Ketua Tim Kunspek Komisi X Abdul Kharis Almayahari saat meninjau kampus ISI Yogyakarta, 12/2/16

## TERKAIT BPIH KOMISI VIII DPR RAPAT Dengan Air Asia Dan Qatar Airways

**K**omisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan maskapai penerbangan Air Asia dan Qatar Airways, terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan maskapai-maskapai penerbangan.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengatakan walaupun telah mengetahui bahwa sesungguhnya Kementerian Agama RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sudah beberapa kali melakukan tender terbuka terhadap berbagai maskapai penerbangan, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dan ditanyakan mengenai komponen terbesar dari biaya penyelenggaraan haji yaitu penerbangan.

"Komisi VIII memandang beberapa hal yang perlu didalami karena ada perubahan penurunan harga Avtur, pelayanan, dan regulasi," katanya, saat memimpin RDPU ini, Senin (15/2/2015), di Gedung DPR, dengan agenda kesiapan maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M.

Direktur Operasional Air Asia Indonesia Ridzeki Tresno Wibowo mengatakan harga akan sulit dibandingkan dengan komersial yang selama ini dijalani. "Air Asia Indonesia start Jeddah baru tahun ini, mungkin untuk harga agak sulit harga normal

karena sifatnya lebih kepada carter bukan regular, jadi mungkin harga agak berbeda dengan harga regular," katanya.

Ridzeki mengatakan yang paling mempengaruhi harga adalah jika itu sebuah carter flight (non-regular) seperti haji. menurutnya jika Air Asia mendapatkan hak penerbangan itu tentunya akan sewa pesawat. "Kalau kita punya pesawat sendiri harga itu akan fix, jika kita akan sewa pesawat, itu akan mempengaruhi harga," katanya.

Selain itu, dia menambahkan pada musim haji ini yang mungkin berubah adalah asuransi, karena asuransi regular dan carter berbeda, termasuk hotel dan ekstra servis.

Country Manager Qatar Airways Ramdas Shiuram, menyampaikan bahwa sampai saat ini hanya mengangkut haji plus, kebutuhan jumlah tempat duduk mempengaruhi, karena penerbangan ini tidak hanya melayani satu negara saja.

Terkait, Komisi VIII menginginkan maskapai penerbangan ketika melayani haji regular, tidak harus transit misalnya, langsung ke Jeddah atau Madinah.

Ramdas mengatakan agak sulit karena traffic flight, karena penerbangan internasional maka harus transit terlebih dahulu ke Doha lalu kemudian ke Jeddah atau Madinah. Hal ini juga terjadi pada Air Asia yang harus transit terlebih dahulu di Malaysia. (as)/foto:kresno/parle/iw.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah

## Mantan Sekjen DPR SITI NURHAYATI Meninggal Dunia



**MANTAN** Sekretaris Jenderal DPR-RI Siti Nurhayati Daud, Senin (15/2) pukul 07.00 WIB meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni, Jakarta setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit tersebut. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Komplek DPR I No. 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat dan akan dimakamkan pada hari ini juga di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Almarhumah Siti Nurhayati Daud menjabat Sekjen DPR pada tahun 2001-2004, merupakan pejabat karir yang merintis dari jabatan paling bawah kemudian meningkat sebagai Kabag Percetakan tahun 1981-1985, Kabag keuangan pegawai, Kabagset. Komisi III, Kabag Perpustakaan dan Kabagset Bamus.

Karirnya terus meningkat menjadi Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Asisten Sekjen Bidang Pengawasan dan pada tahun 2001 menjabat sebagai Wakil Sekjen DPR. Almarhumah berpangkat terakhir Pembina Utama Madya atau golongan IV/d itu meninggalkan seorang suami dan seorang puteri.

Almarhumah dilahirkan di Kutaraja, Aceh pada 21 April 1944, merupakan Sekjen DPR Wanita kedua setelah sebelumnya dijabat Sri Sumaryati Harjanto. (mp)



# RUU PERTANAHAN DIBAWA KE PARIPURNA



Anggota Fraksi Menandatangani RUU Pertanahan di Baleg

**S**eluruh Fraksi di Badan Legsilasi DPR akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pertanahan dibawa ke dalam Rapat Paripurna.

"Apakah anggota Dewan setuju, RUU Pertanahan dibahas dalam Rapat Paripurna," tanya Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto saat memimpin rapat Baleg yang mengagendakan pembacaan mini fraksi, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis sore (11/2).

"Setuju...." Jawab anggota dewan secara serentak, dan palu pun diketuk.

Dalam pandangan mini fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Bambang

kapitalistik, serta struktur kepemilikan dan penguasaan lahan mengakibatkan ketimpangan dalam pertanahan nasional," ujar Bambang.

Menurut juru bicara dari Fraksi PAN Ammy Amalia, dalam pandangan mini fraksinya, berbagai kasus pertanahan disebabkan oleh penguasaan lahan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

"Akar dari permasalahan ini adalah sikap pemerintah yang memberikan tanah tak terbatas luasannya kepada korporasi, namun faktanya, tanah tersebut tidak memberikan manfaat balik, melainkan

Riyanto, RUU Pertanahan bertujuan untuk memenuhi hak atas tanah warga negara dan memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat adat

"Maraknya konflik sengketa pertanahan akibat dari politik pengurusan pertanahan yang

merugikan masyarakat karena rusaknya lingkungan akibat aktivitas korporasi," terang Ammy.

Fraksi PAN berharap, lahirnya RUU Pertanahan ini mampu mengakomodir serta memberikan kekuatan hukum atas hak ulayat, hak kepemilikan tanah perseorangan dan hak menguasai tanah oleh negara.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, RUU pertanahan ini adalah implementasi dari Undang - Undang Pokok Agraria dan persoalan terkait konflik agraria terutama yang melanggar hak rakyat dapat diselesaikan

Diketahui, jelas Totok, kurang lebih 70 persen kasus dipengadilan merupakan persoalan terkait sengketa tanah, sehingga RUU ini diharapkan memberikan penyelesaian yang efektif terhadap kasus sengketa hukum di wilayah NKRI.

"Khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan lahan rakyat yang diberikan kepada negara ternyata sebagian besar disalahgunakan untuk kepentingan bisnis," tegasnya.

Seperti diketahui, Rancangan Undang - Undang (RUU) Pertanahan dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan menjadi rujukan hukum dari segala konflik agraria. (ann), foto : JAYADI/PARLE/HR.

## SEKJEN DPR PIMPIN SERTIJAB KOMANDAN PAMDAL

**SEKRETARIS** Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Pamdal lama Tamamudin (PNS) ke Komandan baru AKBP



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat memimpin Sertijab Kabag Pamdal

Herry Ardyanto (Polri). Ini bagian dari pembenahan sistem pengamanan objek vital negara menuju parlemen modern.

Dalam sambutannya, Win-sapaan akrab Sekjen DPR mengatakan, pengamanan objek vital seperti gedung parlemen ini perlu penanganan khusus. Di gedung ini ada banyak tamu berdatangan, baik tamu VVIP, VIP, maupun masyarakat umum. Di gedung parlemen ini pula, para anggota dewan bekerja merumuskan berbagai kebijakan menyangkut kepentingan publik. Untuk itu, perlu diciptakan suasana kondusif agar para anggota dewan dan tamu merasa nyaman.

Apalagi, lanjut Win, tuntutan masyarakat terhadap parlemen sangat tinggi. Ada yang datang dengan mengikuti prosedur keamanan yang ada di lingkungan parlemen, ada pula yang datang dengan tidak mengikuti prosedur. Pamdal harus siap mengamankan semua kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi, Ibu Kota Jakarta baru saja diguncang kasus teror.

Dengan tiga fungsi yang dijalankan DPR, yaitu pengawasan, anggaran, dan legislasi, tentu keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar kerja para anggota dewan lancar menjalankan tiga fungsi tersebut. Hadir dalam upacara di gedung Nusantara itu Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso, para pejabat di lingkungan DPR, MPR, dan DPD RI. *(mh) foto: nurdiansyah, runi/parle/hr.*

## ENDANG SRIKARTI Gelar Pasar Murah, Pengobatan Gratis, dan Wayang Kulit

**M**asyarakat di Desa Socokangsi, Klaten, Jateng sangat antusias dan bahagia dengan kehadiran pasar murah sekaligus dibarengi dengan pengobatan gratis dan wayang kulit.

Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani (dapil Jateng V) menggelar semua acara tersebut untuk memberdayakan masyarakat di Kecamatan Jatinom, Klaten. Dengan acara ini, ia ingin mengangkat martabat masyarakat pemilihnya agar tetap sehat, bahagia, dan berdaya secara ekonomi.

"Saya tidak ingin rakyat saya menjadi duafa," tuturnya saat membuka acara, baru-baru ini di hadapan masyarakat yang telah mengantri untuk mendapatkan sembako murah.

Sembako yang dijual murah kepada masyarakat setempat ini berupa gula 2 kg dan minyak goreng 2 liter seharga Rp25 ribu. Dua materi sembako ini dijual

setengah harga dari harga pasaran.

Anggota Komisi VI DPR ini menggandeng PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), BUMN yang memproduksi sembako tersebut untuk menjualnya ke masyarakat dengan harga murah. Bersamaan dengan itu, RNI juga mengerahkan anak perusahaannya PT. Phapros yang menyediakan obat-obatan untuk melayani pengobatan gratis.

Acara pembukaan pasar murah tersebut dihadiri DPRD Klaten, Danramil, Kapolsek, dan camat Jatinom. Hadir pula semua Kepala Desa setempat, manajemen RNI dan PT. Phapros.

Sutinah, warga Desa Sucokangsi usai membeli sembako murah, mengaku bahagia dengan pasar murah kali ini. Wanita sepuh ini juga sangat mengenal Endang Srikarti sebagai anggota DPR RI yang sering menggelar pasar murah dan pengobatan gratis. *(mh), foto : mh/parle/hr.*



Endang Srikarti Anggota Komisi VI DPR Menggelar Pasar Murah Di Klaten



# AMNESTI

Tidak Berlaku Bagi

## SEPARATIS BERSENJATA

Suasana Rapat Gabungan Komisi I dan III DPR dengan Pemerintah

**W**akil Ketua Komisi I DPR-RI TB. Hasanuddin memberikan masukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemberian amnesti kepada Din Minimi dan kelompoknya. Pasalnya menurut paparannya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomer 22 tahun 2005.

Dalam Perpres yang menjadi landasan penyangkalannya itu, Hasanuddin mengatakan, Din Minimi beserta kelompoknya telah melakukan gerakan separatis yang menggunakan senjata. Padahal dalam Perpres tersebut dikatakan amnesti tidak berlaku pada mereka yang menggunakan senjata.

"Mereka terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggunakan senjata, dan Din Minimi itu termasuk di dalamnya. Jadi amnesti tidak bisa diberlakukan untuk mereka yang terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata," ujar Hasanuddin seraya

menunjukkan naskah Perpres yang dia maksud, saat Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menko Polhukam beserta jajarannya, Senin (15/2).

Dalam keputusan presiden tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM pada poin keempat disebutkan bahwa, Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan GAM, atau terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Menurut penilaian Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX proses pengambilan keputusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan konteks yang terjadi. "Mari kita lihat proses keluarnya Perpres nomer 22 tahun 2005, itu juga merupakan proses pengambilan keputusan yang bagus," paparnya.

Politisi PDI Perjuangan yang pernah

menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Tahun 2001-2005 ini menguatkan argumennya dengan menjelaskan bahwa pemerintah yang saat ini merupakan kelanjutan yang tidak bisa terputus dari pemerintah yang sebelumnya.

Di kesempatan selanjutnya, Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman mempertanyakan apa kepentingan negara dalam pemberian amnesti. Dia juga menyarankan kepada pemerintah agar membedakan antara tahanan politik dan tahanan kriminal biasa. "Soal Aceh kita juga harus menimbang dampak negatifnya, tidak hanya melihat positifnya saja," tandasnya.

Dalam kesempatan rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan beserta jajarannya, yang juga dihadiri oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kejagung M. Prasetyo, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon.*(eko,mp/foto: runi, andri)*



# BERITA BERGAMBAR



Wakil Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto meninjau lokasi infrastruktur PLTPB Pertamina Goethermal Energy Lahendong-Sulawesi Utara, Senin (15/02), foto : eka hindra/parle/hr.



Tim Kunker Komisi IV DPR RI Sidak ke Gudang Bulog Panaikang Makassar, Rabu (03/02), foto : iwan armanias/parle/hr.



Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR RI dipimpin Elfa Hartati berdialog sekaligus meninjau RS Lavalette Malang bersama direktur RS beserta jajaran dan PT Jasindo, terkait program Jamkestama, Senin (15/02), foto:ray/parle/hr.